

## EFEKTIVITAS PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 26 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ahmad Hafizhi<sup>1</sup>, Arpandi<sup>2</sup>, Agus Surya Dharma<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
e-mail: hafizhiaahmad9@gmail.com

### ABSTRAK

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu serta menekan angka putus sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang memengaruhi tingkat efektivitas program, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan jumlah penerima, rendahnya pemahaman penerima manfaat, serta lemahnya pengawasan pemanfaatan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang di pilih secara purposive sampling, meliputi kepala madrasah, operator, bendahara, komite madrasah, orang tua, dan peserta didik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Hulu Sungai Utara belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh belum meratanya distribusi dana, keterbatasan kuota penerima, rendahnya pemahaman orang tua dan peserta didik terhadap tujuan penggunaan dana, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, perbaikan perencanaan dan pendataan penerima, serta penguatan pengawasan agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Efektivitas program, Program Indonesia Pintar, kebijakan pendidikan, Pendidikan dasar

### ABSTRACT

*The Indonesia Smart Program (PIP) is a government policy aimed at improving access to and equity in education for students from economically disadvantaged families and reducing school dropout rates. However, its implementation still faces several challenges that affect program effectiveness, such as inaccurate targeting, limited number of beneficiaries, low understanding of beneficiaries regarding fund utilization, and weak supervision mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of the Indonesia Smart Program (PIP) and the factors influencing its implementation at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26, Hulu Sungai Utara Regency. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving 13 informants selected using purposive sampling, including school principals, operators, treasurers, school committees, parents, and students. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Indonesia Smart Program at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 has not been fully effective. This is reflected in uneven fund distribution, limited beneficiary quotas, low understanding among parents and students regarding the program's objectives, and inadequate supervision and control mechanisms. Therefore, improvements are needed in program socialization, beneficiary data planning, and supervision systems to ensure more effective and targeted implementation.*

**Keywords:** program effectiveness, Indonesia Smart Program, education policy, primary education

## PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan aktivitas yang memiliki cakupan sangat luas dan multidimensional. Hampir seluruh aspek yang membentuk kehidupan manusia ikut memengaruhi dan terlibat di dalamnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologis, sosiologis, bahkan keagamaan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan strategi di bidang pendidikan harus mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut agar benar-benar mampu mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan nasional sebagaimana dikemukakan dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dirancang secara sadar dan terencana untuk menciptakan kondisi belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi dirinya secara aktif. Potensi tersebut meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pembentukan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta berbagai keterampilan yang dibutuhkan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Jaminan terhadap hak memperoleh pendidikan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan adanya prinsip kesetaraan tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, sambil tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai budaya, dan keberagaman bangsa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun, sekaligus memperluas akses dan kesempatan belajar hingga ke jenjang perguruan tinggi. Program Indonesia Pintar (PIP) diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah (6–12 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam atau musibah. Program ini merupakan pengembangan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mulai disempurnakan sejak akhir tahun 2014.

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan akses pendidikan tersebut, pemerintah menggulirkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan utama memberikan dukungan finansial kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu dan rentan. Melalui program ini diharapkan angka partisipasi sekolah dapat meningkat, risiko putus sekolah dapat ditekan, serta kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial dapat dikurangi. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP pada tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan.

Bantuan yang diberikan sejatinya memungkinkan peserta didik lebih berkonsentrasi pada peningkatan kualitas diri, pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan intelektual tanpa dibebani kecemasan terhadap pemenuhan kebutuhan sekolah. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi program ini kerap tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan pedoman

dan petunjuk teknis KIP, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan bantuan di satuan pendidikan. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Hulu Sungai Utara, efektivitas PIP masih tergolong rendah. Keterbatasan dan ketidaktepatan alokasi dana menyebabkan sebagian peserta didik yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak terakomodasi. Selain itu, pemahaman orang tua penerima yang masih terbatas mengenai tujuan program sering mengakibatkan dana digunakan untuk kebutuhan di luar pendidikan. Pengawasan pun mengalami kendala, seperti kesulitan memperoleh bukti penggunaan dana akibat mekanisme transfer langsung ke rekening keluarga serta keterlambatan pencairan yang dipicu oleh ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas pribadi. Jumlah penerima yang berubah-ubah setiap tahun juga menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pelaksanaan program. Berbagai persoalan ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan pendidikan dan tujuan strategis PIP secara nasional, sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam untuk menilai tingkat efektivitasnya serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses implementasi program, persepsi pelaksana dan penerima manfaat, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas program dalam konteks alami (Sugiyono, 2016). Penelitian dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, Program Indonesia Pintar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan..

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Efektivitas suatu program dapat dinilai melalui tingkat ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan serta sejauh mana pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien untuk merealisasikan sasaran tersebut. Gibson, sebagaimana dikemukakan dalam Tangkilisan (2015), menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh output akhir yang diperoleh, melainkan juga oleh mutu proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam kerangka ini, terdapat tujuh faktor utama yang memengaruhi efektivitas program, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, ketepatan strategi dalam mencapai tujuan, kualitas proses analisis dan perumusan kebijakan, ketepatan perencanaan, kesesuaian penyusunan program, kecukupan sarana dan prasarana, serta keberfungsian sistem pengawasan dan pengendalian.

#### **1. Kejelasan Tujuan**

Variabel ini berlandaskan pada tingkat kejelasan sasaran yang ingin diwujudkan, dengan tujuan agar para pegawai memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga setiap aktivitas kerja selaras dengan target yang ditetapkan dan tujuan organisasi dapat direalisasikan secara optimal

a. Sasaran yang Terarah

Pelaksanaan kebijakan sangat penting dalam menentukan seberapa berhasil suatu kebijakan itu. Karena itu, pencapaian tujuan kebijakan tergantung pada sejelas-jelasnya tujuan yang ditetapkan dan cara mengukur keberhasilannya. Tujuan yang dibuat harus jelas dan bisa diukur, agar bisa diterapkan dengan baik dan sesuai dengan kondisi sosial serta budaya di tingkat pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, aspek kejelasan tujuan masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan syaratnya. Beberapa siswa dari keluarga ekonomi kuat malah menerima bantuan, sementara banyak siswa dari keluarga tidak mampu belum mendapat bantuan seperti yang seharusnya.

b. Tujuan Organisasi

Kebijakan bisa dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuannya, terutama jika indikator dan target yang digunakan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di lapangan saat kebijakan diterapkan. Penilaian efektivitas biasanya dilakukan secara kualitatif, yang artinya fokus pada kualitas. Hasil penilaian ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan sederhana, sehingga jika kualitas hasilnya baik, maka kebijakan tersebut dianggap efektif.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi dalam menerapkan kebijakan Program Indonesia Pintar kurang efektif karena tidak selaras dengan panduan operasional. Meski sebagian orang tua siswa memahami bahwa dana tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak, tetapi secara keseluruhan program ini belum mampu mencapai tujuannya. Program ini bertujuan untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu atau tidak mampu melalui pemberian bantuan dana Program Indonesia Pintar, agar beban biaya pendidikan mereka berkurang. Selain itu, adanya Program Indonesia Pintar juga membantu memperkuat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, mencegah siswa dari keluarga yang kurang mampu putus sekolah karena kendala keuangan, serta membantu meringankan biaya pendidikan secara keseluruhan.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam menerapkan Program Indonesia Pintar, diperlukan cara atau aturan tertentu yang harus ditaati saat menerapkan inisiatif tersebut. Kebutuhan akan kejelasan cara ini menunjukkan bahwa cara tersebut berperan sebagai panduan utama dalam menjalankan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga para pelaksana tidak tersesat dalam usaha mencapai visi organisasi.

a. Strategi Pencapaian Tujuan pencapaian

Efektivitas Program Indonesia Pintar terlihat dari semua upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target-target lembaga. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan rencana yang matang atau pendekatan strategis agar setiap langkah menuju tujuan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, dan prosesnya berjalan dengan fokus yang tepat. Oleh karena itu, pendekatan strategis ini sangat penting dalam usaha meraih tujuan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan untuk mencapai tujuan sudah berjalan secara efektif. Pendekatan pencapaian tujuan Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri

26 Hsu, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah berjalan, yang terlihat dari adanya kemajuan dan semangat belajar siswa yang meningkat.

b. Tindakan

Program Indonesia Pintar memiliki strategi yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan tersebut harus mengenal dan memiliki objek yang akan dilakukan. Tindakan juga harus dilakukan sesuai urutan yang benar atau telah berkembang dan dilakukan dengan baik. Untuk mencapai tujuan, diperlukan adanya tindakan yang tepat.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa tindakan strategi pencapaian tujuan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses menganalisis dan menyusun kebijakan yang kuat, yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai serta strategi yang sudah ditentukan, berarti kebijakan tersebut harus mampu menghubungkan antara tujuan-tujuan dengan upaya-upaya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari

a. Proses Analisis/Seleksi

Tahap yang sangat penting dalam proses analisis adalah kemampuan untuk memahami seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan suatu masalah, kemudian menganalisis kondisi yang ada untuk mengetahui isu utama, serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyiapan kebijakan dinilai sudah cukup baik meskipun wewenang utamanya berada di tingkat pusat. Dalam hal ini, sekolah hanya bertugas mengajukan usulan serta memantau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Program Kartu Indonesia Pintar. Pemerintah pusat seharusnya menyalurkan bantuan sesuai daftar siswa yang diajukan oleh sekolah, yaitu siswa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima.

b. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan proses merancang kebijakan yang dinilai efektif dan dapat diterima untuk merespons permasalahan yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan. Tahapan ini berkaitan dengan upaya menentukan berbagai alternatif solusi yang dapat dipilih, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan perumusan kebijakan dinilai telah berjalan cukup efektif meskipun kewenangan utama berada di tingkat pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pihak sekolah berperan dalam mengajukan usulan serta melakukan pemantauan terhadap kelancaran implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menyalurkan bantuan sesuai dengan daftar peserta didik yang diajukan oleh sekolah, yakni mereka yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima program.

4. Perencanaan yang matang

Secara umum, perencanaan yang baik adalah proses menentukan dari awal apa-apa saja langkah yang akan diambil oleh organisasi untuk menjalankan kegiatannya di masa depan

a. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang adalah jenis perencanaan yang mencakup tujuan dan langkah-langkah yang dibuat untuk waktu yang lebih lama, serta memerlukan pertimbangan yang lebih matang agar bisa dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, sekolah mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk memverifikasi data siswa yang diajukan sebagai penerima bantuan dari Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator perencanaan yang baik, terutama pada aspek perencanaan jangka panjang dalam Program Indonesia Pintar, sudah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya proses pemeriksaan dan pembaruan data siswa yang dilakukan oleh sekolah sebelum program dimulai, sehingga memudahkan pelaksanaan bantuan di lapangan

b. Perencanaan jangka pendek

Perencanaan jangka pendek adalah tipe perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu yang tidak terlalu panjang, biasanya satu hingga dua tahun, dan tidak membutuhkan struktur yang terlalu rumit dalam pembuatannya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator kedua dari perencanaan yang baik, yaitu perencanaan jangka pendek dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari adanya perencanaan awal yang telah dibuat oleh pihak sekolah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan lebih mudah dilakukan.

5. Penyusunan Program yang Tepat

Membuat program yang baik pada dasarnya adalah menentukan rencana yang sudah bisa dikerjakan dan jelas, tetapi masih perlu diubah menjadi serangkaian kegiatan yang tepat agar program tersebut dapat diterapkan dengan baik. Karena itu, dalam menjalankan program diperlukan strategi yang tepat agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan efektif

a. Program-program pelaksana

Pelaksanaan program adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk aktivitas sehari-hari yang didukung oleh kebijakan, prosedur, dan ketersediaan sumber daya, dengan tujuan menghasilkan hasil tertentu yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dalam penyusunan program yang tepat, yaitu adanya program pelaksanaan, sudah berjalan efektif karena semua kegiatan sudah dirancang dan disiapkan terlebih dahulu sebelum dijalankan

b. Pedoman Pelaksanaan

Pelaksanaan program adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui kegiatan sehari-hari, didukung oleh kebijakan, prosedur, dan ketersediaan sumber daya, dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dalam penyusunan program

yang tepat, yaitu adanya program pelaksanaan, sudah berjalan efektif karena semua kegiatan sudah dirancang dan disiapkan secara lengkap sebelum dilaksanakan.

#### 6. Tersedianya sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki arti yang berbeda, namun keduanya sangat berkaitan. Karena saling melengkapi dalam menjalankan tugas masing-masing, keduanya penting dalam mendukung seluruh proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kedua hal ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pendidikan

##### a. Sarana

Sarana merupakan berbagai sumber daya, alat, atau fasilitas yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan infrastruktur yang bertujuan mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran administrasi yang telah ditetapkan. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah efektif, yang dapat dilihat dari tabel sarana madrasah yang sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

##### b. Prasarana

Prasarana dapat diartikan sebagai berbagai fasilitas dasar yang berperan sebagai infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun fasilitas tersebut tidak digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi tetap memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan berjalan lancar, nyaman, dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar telah berjalan dengan baik dari segi prasarana. Hal ini terlihat dari kondisi fasilitas sekolah yang sudah tersedia dengan cukup baik, seperti adanya printer, komputer, dan jaringan internet (wifi) yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut

#### 7. Sistem Pengawasan dan pengendalian

Karena manusia memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilannya memerlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran, sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

##### a. Pengawasan

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menentukan standar kinerja dan mengontrol pelaksanaan tindakan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tercapainya proses belajar mengajar yang efektif secara maksimal, penerapan pengawasan yang baik sangat diperlukan di MIN 26 Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar masih belum cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dengan data yang ditemukan dari peserta didik dan orang tua, sehingga menyebabkan ketidakpuasan sosial akibat penyaluran dana PIP yang belum merata dan belum optimal

##### b. Pengendalian

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menetapkan standar kinerja dan mengawasi pelaksanaan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Untuk mendukung proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif, diperlukan penerapan pengawasan yang baik di MIN 26 Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa

pengawasan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar belum cukup efektif. Hal ini terlihat dari perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dengan data yang diperoleh dari peserta didik dan orang tua, sehingga menyebabkan ketidakpuasan sosial karena penyaluran dana PIP belum merata dan belum optimal.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas program kartu indonesia pintar pada MIN 26 HSU**

Dalam menjalankan sebuah program, selalu ada hal-hal tertentu yang bisa membantu atau menghalangi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga berlaku pada Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberhasilan program tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat.

### **1. Faktor Pendukung**

Berikut ini adalah faktor yang mendukung Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara :

#### **a. Siswa Menjadi Lebih Aktif Terhadap Sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengajar sudah efektif, karena terjadi peningkatan dan semangat siswa dalam belajar setelah mendapatkan dana Kartu Indonesia Pintar. Hasil observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung, yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam belajar di sekolah, dan kegiatan sudah berjalan dengan baik, terlihat dari perkembangan belajar siswa yang menerima PIP atau bantuan tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung program ini sudah efektif, artinya strategi pencapaian tujuan Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan. Terdapat peningkatan dan semangat siswa dalam belajar yang sudah baik karena operator atau pengelola program sudah cukup efektif dalam menerapkan kebijakan pemerintah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Indonesia Pintar

#### **b. Informasi Dari Pihak Dinas yang Dilakukan Rutin Secara Online Melalui Whatsapp**

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah adanya informasi yang diberikan oleh pihak dinas secara rutin melalui online untuk memudahkan proses penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian, terlihat bahwa faktor pendukung Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah adanya informasi yang diberikan secara rutin melalui online atau melalui grup Whatsapp oleh pihak dinas terkait. Dari hasil dokumentasi grup Whatsapp yang didapatkan oleh peneliti, terlihat bahwa faktor pendukung Program Indonesia Pintar memang ada, yakni adanya informasi langsung dari dinas melalui media online atau melalui grup Whatsapp mengenai keluarnya nominasi penerima PIP, serta langsung diminta untuk segera melakukan aktivasi. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah adanya

informasi yang diberikan oleh pihak dinas secara rutin melalui online atau aplikasi Whatsapp mengenai program PIP.

- c. mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening peserta didik

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening peserta didik, sehingga memudahkan proses penyaluran dana Program Indonesia Pintar. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening peserta didik merupakan faktor pendukung utama dalam penyaluran dana PIP

## 2. Faktor yang Menghambat

Berikut ini adalah faktor yang menghambat Efektivitas Program Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara :

- a. Tidak Adanya Rapat Tentang PIP pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU

Mengadakan rapat dalam menjalankan Program Indonesia Pintar termasuk suatu proses dalam pengawasan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 HSU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor tersebut adalah tidak adanya rapat terkait Program Indonesia Pintar atau PIP. Selain itu, pengawasan dalam program ini belum efektif karena rapat yang dilakukan belum optimal, sehingga tidak berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Akibatnya, pemahaman orang tua siswa tentang program ini masih kurang. Dari hasil observasi, juga ditemukan bahwa pengawasan dalam program ini tidak efektif. Hal ini karena tidak adanya rapat antara pihak sekolah atau komite dengan orang tua siswa terkait program Indonesia Pintar. Selain itu, orang tua siswa masih kurang memahami dan tidak jelas tentang manfaat dari PIP. Dengan mempertimbangkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar belum efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rapat atau koordinasi yang memadai, sehingga menghambat kelancaran program dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- b. Kurangnya Komunikasi antara Pihak Sekolah dengan Masyarakat Tentang PIP

Dunia pendidikan memerlukan peran lebih aktif dari orang tua agar bisa mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah, hasil pendidikan bisa lebih optimal sesuai dengan harapan. Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih kurang efektif karena koordinasi dan komunikasi antara sekolah dengan orang tua murid belum maksimal. Akibatnya, pengawasan, pengendalian, serta kebijakan dalam program tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum efektif. Hal ini karena tidak adanya koordinasi atau rapat dengan komite sekolah dan orang tua siswa terkait penggunaan dana program tersebut. Dana harus

digunakan untuk keperluan pendidikan, namun hal ini belum terlaksana dengan baik. Dari hasil dokumentasi foto pembelian, terlihat bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana Program Indonesia Pintar yang dikelola oleh orang tua siswa masih kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa ada hambatan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Faktor pembatas utamanya adalah kurangnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa. Hal ini menyebabkan kendala dalam pencairan dana ke bank, serta kurangnya pemahaman dan kejelasan tentang penggunaan dana tersebut.

- c. Rendahnya pemahaman orang tua dan peserta didik terhadap tujuan dan ketentuan penggunaan dana PIP turut menghambat efektivitas program

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, terlihat bahwa tujuan dan ketentuan penggunaan dana PIP yang dilakukan belum efektif, yaitu karena kurangnya pemahaman orang tua dan peserta didik mengenai tujuan serta ketentuan penggunaan dana PIP tersebut, bahwa dana tersebut harus digunakan untuk keperluan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, yaitu karena kurang pemahaman orang tua dan peserta didik terhadap tujuan dan ketentuan penggunaan dana PIP, bahwa dana tersebut harus digunakan untuk keperluan pendidikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukan berbagai kelemahan di beberapa indikator efektivitas, terutama di aspek kejelasan tujuan, ketepatan sasaran penerima, serta sistem pengawasan dan pengendalian. Dari sisi kejelasan tujuan, PIP belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada siswa dari keluarga yang mampu yang mendapat bantuan, sedangkan sebagian siswa yang kurang mampu justru tidak terakomodasi. Selain itu, meskipun tujuan PIP yaitu membantu biaya pendidikan dan mencegah putus sekolah sudah diketahui oleh sebagian orang tua, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan tujuan kebijakan. Dalam aspek strategi pencapaian tujuan dan tindakan pelaksanaan, program ini cukup berjalan baik. Bantuan PIP mampu meningkatkan semangat dan partisipasi belajar siswa. Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh madrasah juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun hasilnya belum optimal karena keterbatasan kuota dan kendala teknis. Pada aspek perumusan kebijakan dan perencanaan, prosesnya dinilai cukup efektif karena kebijakan PIP telah dibuat secara nasional, dan sekolah bertugas mengusulkan serta memverifikasi data penerima. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang juga telah dilakukan melalui pendataan dan pengusulan calon penerima, sehingga secara administratif program dapat berjalan. Dalam hal penyusunan program serta ketersediaan sarana dan prasarana, MIN 26 HSU telah memiliki fasilitas yang cukup seperti komputer, printer, dan jaringan internet yang mendukung pengelolaan PIP. Program telah disusun dan dijalankan sesuai prosedur. Namun, kurangnya sosialisasi dan pedoman teknis kepada orang tua menyebabkan penggunaan dana belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Aspek terlemah dalam pelaksanaan PIP di madrasah ini adalah sistem pengawasan dan pengendalian. Kurangnya koordinasi, tidak adanya rapat khusus PIP, serta rendahnya partisipasi orang tua dalam pelaporan penggunaan dana membuat

pengawasan tidak optimal. Hal ini menyebabkan sulitnya memastikan dana PIP benar-benar digunakan untuk keperluan pendidikan. Efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Hulu Sungai Utara tidak hanya ditentukan oleh mekanisme kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam praktik implementasi di tingkat satuan Pendidikan

#### 1. Faktor Pendukung

Di sisi lain, ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan Program Indonesia Pintar di MIN 26 Hulu Sungai Utara. Salah satunya adalah semangat belajar siswa yang meningkat karena mendapatkan bantuan PIP. Bantuan ini membantu mengurangi biaya pendidikan, sehingga siswa bisa lebih fokus belajar. Faktor lainnya adalah adanya informasi dari dinas pendidikan yang diberikan secara rutin, baik melalui internet maupun grup komunikasi seperti WhatsApp. Informasi tersebut, seperti daftar nama siswa yang berhak dan cara mengaktifkan rekening, membantu sekolah dan orang tua mempercepat pencairan dana. Selain itu, cara penyaluran dana langsung ke rekening siswa juga mendukung keberhasilan program. Sistem ini memudahkan distribusi bantuan, mempercepat proses pencairan, dan mengurangi kemungkinan dana disalahgunakan di tingkat sekolah, sehingga meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban program

#### 2. Faktor Penghambat

Salah satu hal yang menghalangi pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah kurangnya rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin. Tidak adanya forum resmi antara sekolah dan orang tua menyebabkan informasi mengenai tujuan, cara kerja, serta ketentuan penggunaan dana PIP tidak tersampaikan secara lengkap. Akibatnya, program tidak berjalan sesuai dengan harapan, khususnya dalam penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Selain itu, kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa juga menjadi hambatan besar. Karena komunikasi yang tidak memadai, sebagian orang tua mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana di bank, serta kurang memahami prosedur dan ketentuan program. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap aturan penggunaan dana PIP yang rendah. Faktor lain yang menghambat adalah rendahnya pemahaman orang tua dan peserta didik mengenai tujuan serta aturan dana PIP. Beberapa orang tua masih menganggap dana ini sebagai bantuan umum, bukan bantuan khusus untuk pendidikan. Akibatnya, dana digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuannya, sehingga mengurangi efektivitas program dalam mendukung proses belajar mengajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 26 Hulu Sungai Utara masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu diperbaiki pendataan penerima, ditingkatkan sosialisasi kepada orang tua, ditingkatkan komunikasi serta koordinasi antar pihak, serta diperketat sistem pengawasan, agar tujuan utama PIP, yaitu meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, dapat tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Badrudin. (2015). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Mahsun, M. (2015). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.



Mardiasmo. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Mutiarin, D. and Zaenudin, A. (2015). *Manajemen bencana*. Yogyakarta: Gava Media.

Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. (2020). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Silalahi, U. (2015). *Asas-asas manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, H.N.S. (2015). *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara.